TANWIR: JURNAL INTEGRASI KEILMUAN ISLAM
Persatuan Pelajar Indonesia di Tunisia
Vol. 1, No. 21, Desember 2024, (173-186)
https://tanwir.ppitunisia.com/index.php/pt24/index

Refleksi Pemikiran Al-Farabi terhadap Transformasi Sosio-Politik Timur Tengah

Naufal Sholahuddin
Ez-Zitouna University
21, Rue Sidi Aboulkacem El-Jelizi, Place du Leader, 1008 Tunis - Tunisie
email*: sholahuddinnaufal1040400@gmail.com*

Abstrak:

Revolusi di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara pada akhir 2010, yang dikenal sebagai Arab Spring, mengungkapkan kebutuhan mendesak akan transformasi sosio-politik yang berlandaskan keadilan, kepemimpinan yang bermoral, dan partisipasi warga negara. Dalam konteks ini, pemikiran politik Al-Farabi, khususnya dalam karyanya Ara Ahl al-Madinah al-Fadhilah (Pemikiran Penduduk Kota Utama), menawarkan kerangka filosofis yang relevan untuk memahami dan membentuk tatanan masyarakat ideal. Al-Farabi menekankan pentingnya kepemimpinan yang bijaksana dan keadilan sebagai dasar dalam menciptakan stabilitas politik dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis teoritis kualitatif dengan merujuk pada karya utama Al-Farabi serta berbagai literatur tentang revolusi di kawasan tersebut. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa konsep-konsep kunci Al-Farabi, seperti pemerintahan berbasis nilai moral, keadilan sosial, dan partisipasi aktif masyarakat, memiliki potensi signifikan untuk menjadi panduan dalam upaya merekonstruksi dinamika sosio-politik pasca-revolusi. Tulisan ini bertujuan untuk merefleksikan bagaimana filsafat politik Al-Farabi dapat diimplementasikan dalam membangun tatanan politik yang stabil dan adil di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara, serta menghindari kembalinya kekuasaan yang otoriter dan tidak bermoral.

Kata Kunci: Sosio-Politik, Timur-Tengah, Afrika Utara, Filsafat, Al-Farabi

Abstract:

The revolutions in the Middle East and North Africa at the end of 2010, known as the Arab Spring, revealed an urgent need for socio-political transformation rooted in justice, moral leadership, and citizen participation. In this context, Al-Farabi's political philosophy, particularly in his work Ara Ahl al-Madinah al-Fadhilah (The Ideas of the Virtuous City), offers a relevant philosophical framework for understanding and shaping the structure of an ideal society. Al-Farabi emphasizes the importance of wise leadership and justice as the foundation for achieving political stability and social welfare. This study employs a qualitative theoretical analysis approach by referencing Al-Farabi's primary works and various literatures on the revolutions in the region. The findings indicate that Al-Farabi's key concepts, such as governance based on moral values, social justice, and active citizen participation, hold significant potential as a guide in reconstructing post-revolution socio-political dynamics. This paper aims to reflect on how Al-Farabi's political philosophy can be implemented to build a stable and just political order in the countries of the Middle East and North Africa, while avoiding the return of authoritarian and immoral power.

Keywords: Socio-politics, Middle East, North Africa, Philosophy, Al-Farabi

Pendahuluan

Genap 14 tahun berlalu, tepatnya pada 17 Desember 2010 pemuda Tunisia bernama Muhammad Bouazizi membakar dirinya di kota Sidi Bouzid sebagai bentuk protesnya terhadap pemerintahan yang tidak mengedapankan hak-hak rakyatnya. Gerakan ini makin meluas hingga Negara Afrika Utara lainnya bahkan hingga Timur-Tengah seperti Yaman, dan Syiria. Tragedi ini tidak terjadi begitu saja, namun disebabkan oleh pemerintahan yang tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya dan hanya mengedepankan kepentingan pribadi dan golongannya.

Dalam hal ini, perlu ditinjau ulang seperti apakah sistim pemerintahannya kala itu, dan apa saja faktor penyebab kekacauan tersebut, sehingga kita bisa merumuskan solusi-solusi yang lebih relevan untuk menghindari kejadian yang sama di masa mendatang.

Membahas isu sosio-politik di Timur Tengah dan Afrika Utara, sosok filsuf Islam Al-Farabi sangat relevan untuk dikaji secara mendalam, dengan menjadikan karya monumentalnya, *Al-Madinah al-Fadilah*, sebagai dasar penelitian. Buku ini dilatarbelakangi oleh situasi kehidupan Al-Farabi di masa tersebut, yang diliputi oleh konflik-konflik pemerintahan dan negara, seperti perebutan kekuasaan antara Dinasti Abbasiyah dengan negara-negara seperti Turki dan Persia. Fungsi negara, menurut Al-Farabi, adalah sebagai institusi yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan individu demi mencapai kebahagiaan sosial.[1]

Dalam *Al-Madinah al-Fadilah*, Al-Farabi menyatakan bahwa masyarakat terdiri dari individu-individu dengan fungsi dan kemampuan yang berbeda-beda, yang bekerja sama dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama.[2] Dari sudut pandang politik, demokrasi dianggap memiliki posisi strategis karena diyakini dapat menjaga iman dan mempertahankan pedoman etik di tengah perubahan zaman yang semakin modern. Berbagai tokoh Islam memiliki pandangan yang berbeda mengenai hubungan antara agama dan sains. Namun, untuk menciptakan negara yang ideal, diperlukan pemikiran rasional yang tidak hanya bergantung pada kisah sejarah dalam merumuskan kebijakan publik.

Al-Farabi, filosof yang datang setelah Al-Kindi, juga berkeyakinan bahwa antara agama dan filsafat (sains) tidak ada pertentangan. Dasar yang dipakainya untuk itu dua, pertama pengadaan keharmonisan antara filsafat Aristoteles dan Plato sehingga ia sesuai dengan dasar-dasar Islam dan kedua, pemberian Tafsiran rasional terhadap ajaran-ajaran Islam.[3]

Filsafat kenabian memiliki kaitan erat dengan teori politik Al-Farabi. Negara, menurut Al-Farabi, seperti halnya tubuh manusia, terdiri dari bagian-bagian yang saling terhubung dan memiliki fungsi-fungsi tertentu yang harus dijalankan demi kepentingan seluruh tubuh. Salah satu tugas utama dalam negara adalah peran kepala negara, yang dalam analogi tubuh manusia setara dengan akal. Kepala negara merupakan sumber dari semua peraturan dan keharmonisan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kepala negara harus memiliki tubuh yang sehat dan kuat, cerdas, serta mencintai ilmu pengetahuan dan keadilan.[4]

Untuk mewujudkan negara yang ideal, Sidi Ritaudin dalam jurnalnya mengusulkan agar konsep egalitarianisme dalam bernegara diaktualisasikan, sehingga tidak hanya menjadi ilmu teoritis yang jauh dari praktik. Masyarakat egaliter[5] dalam Islam adalah masyarakat yang

---

[1]. Jamalul Muttaqin & Syamsiyani, 'Al-Farabi: Politik Sebagai Jalan Kebahagiaan', *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, 14 (2022), hal. 130.

[2]. Abu Nashr Al-farabi, *Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah* (Maktabah Matba'ah Muhammad Ali, 1959).

[3]. Harun Nasution, *Akal Dan Wahyu Dalam Islam*, (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hal. 83.

[4]. Harun Nasution, *Filsafat Dan Mistisisme Dalam Islam* (Bulan Bintang, 2014), hal. 21.

[5]. Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), arti kata egaliter adalah bersifat sama atau sederajat. Demikian dapat dipahami bahwa baik kata 'bersifat sama' maupun 'sederajat', keduanya merupakan kata yang memiliki makna sama dengan egaliter alias bersinonim.

berlandaskan konsep teologi utama dalam agama Islam, yaitu tauhid, yang menyatakan bahwa Allah itu transenden, unik, dan tanpa sekutu.

Masyarakat yang berpegang pada tauhid tidak dapat mentolerir adanya pemisahan berdasarkan faktor sosial, etnis, kesukuan, atau nasional, maupun adanya wewenang politik yang otonom dalam kaitannya dengan tatanan keilahian. Kedaulatan mutlak Tuhan akan tetap menguasai seluruh aspek kehidupan, baik individu maupun sosial. Oleh karena itu, kekuasaan politik yang berprinsip egalitarianisme akan lebih mampu mewujudkan negara yang ideal, yaitu sebuah negara yang makmur dan berkeadilan, sebagaimana dicontohkan oleh Negara Madinah, yang berpredikat baldatun *ṭayyibatun wa rabbun gafūr*.[6]

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkapkan pemikiran yang berkaitan dengan kenyataan yang ada di lapangan melalui pendekatan *library research*. Menurut Creswell (2016), penelitian kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap muncul dari masalah sosial atau kemanusiaan oleh individu atau kelompok tertentu. Penelitian ini akan mengkaji pemikiran politik Al-Farabi.

Referensi utama dalam penelitian ini adalah buku *Al-Farabi: Ara Ahl Al-Madinah al-Fadhilah*, yang menunjukkan upaya Al-Farabi dalam menjadikan politik sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan, melalui perumusan visi dan misi bersama yang dijalankan oleh pemimpin dan masyarakat. Fenomena Arab Spring menjadi bahan refleksi yang menarik, jika dipadukan dengan pemikiran Al-Farabi. Selain itu, referensi tambahan diambil dari buku-buku filsafat, jurnal, serta dokumentasi media cetak dan digital yang relevan dengan pemikiran politik Al-Farabi dan peristiwa Arab Spring.

Hasil dan Pembahasan

Tatanan sosio-politik yang dewasa ini tergambar di benak kita, jauh dari kata ideal sebagaimana yang digagas oleh al-Farabi. Fenomena Arab Spring mengangkat pertanyaan mendalam tentang dinamika sosio-politik negara-negara Arab, khususnya terkait tantangan dalam mencapai stabilitas dan persatuan meskipun memiliki kesamaan identitas sosiologis. Tuhan mereka sama, ibadah mereka sama, lalu kenapa ketika dihadapkan dengan kekuasaan saling menyenggol satu sama lain demi kepentingan pribadi dan golongan? Penulis asal Lebanon Syakib Arsalan pernah menulis buku yang berjudul Mengapa Umat Muslim Tertinggal? Dan Mengapa Umat Lainnya Maju? Ini mengindikasikan bahwasanya mereka bangsa Arab mengakui akan kemunduranya. Maka dari itu penelitian ini akan berusaha mendalami berbagai faktor dan penyebab hingga dampak yang terjadi setelah tragedi Arab Spring dengan menjadikan filsafat politik al-Farabi sebagai refleksi.

Pengertian Sosio-Politik

Saat ini, ilmu sosial berkembang lebih pesat dibandingkan sebelumnya. Hal ini terlihat dari semakin luasnya objek kajian dalam sosiologi, termasuk bidang sosiologi politik. Bahkan, sosiologi yang awalnya hanya bagian dari sejarah sosiologi kini telah menjadi cabang ilmu filsafat. Sebelum memahami sosiologi politik, penting untuk mengetahui bahwa bidang ini merupakan kajian interdisipliner yang menggabungkan dua ilmu, yaitu sosiologi dan politik. Jika

[6]. M. Sidi Ritaudin, 'Rekonstruksi Politik Egalitarianisme Bangsa Perspektif Model Negara Madinah', *IAIN Raden Intan Lampung*, 6 (2016), hal. 156.

sosiologi mempelajari masyarakat, maka politik lebih fokus pada penguasa atau pihak yang membuat keputusan.[7]

Menurut Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku sosial. Perilaku ini memiliki makna subjektif bagi individu yang melakukannya, yaitu makna yang ia sadari dan anggap penting. Kesadaran akan arti dari perilaku tersebut merupakan ciri utama manusia. Suatu perilaku disebut sosial jika maknanya bagi pelaku mendorongnya untuk mempertimbangkan perilaku orang lain.[8]

Perilaku sosial dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe. Namun, penting untuk diingat bahwa tipe-tipe ini bersifat konseptual atau teoritis. Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku yang kita temui sering kali merupakan campuran dari keempat tipe berikut:

1. Perilaku ini diarahkan secara rasional untuk mencapai tujuan tertentu. Pelaku mempertimbangkan dampak dari tindakannya dengan matang. Misalnya, seseorang yang merencanakan kariernya dengan mempertimbangkan langkah-langkah yang efektif untuk mencapainya.
2. Perilaku ini didasarkan pada nilai tertentu, seperti keindahan (estetika), kebebasan (nilai politik), atau persaudaraan (nilai agama). Individu hidup sesuai dengan nilai-nilai ini tanpa memikirkan tujuan lain. Meski perilaku ini rasional karena pelaku rela menanggung risiko demi keyakinannya, di sisi lain, ia irasional karena tidak mempertimbangkan nilai-nilai lain. Contohnya adalah seseorang yang fanatik terhadap agama atau nilai tertentu sehingga mengabaikan pandangan lain.
3. Perilaku ini dipengaruhi oleh emosi, seperti mengabdikan diri pada seseorang atau bertindak berdasarkan ketegangan emosional. Dorongan emosional ini bisa baik atau buruk, tetapi sering kali dilakukan tanpa pertimbangan logis. Contohnya adalah tindakan impulsif yang kita sebut sebagai "membabi buta."
4. Perilaku ini didasarkan pada kebiasaan atau tradisi yang sudah berlangsung lama. Pelaku melakukannya secara otomatis tanpa memikirkan alasan atau tujuannya. Contohnya adalah kebiasaan menyapa orang tua dengan cara tertentu tanpa mempertimbangkan maknanya.[9]

Di era globalisasi seperti saat ini, persoalan penggunaan nalar logika memang menjadi hal fundamental dalam menghadapi berbagai fenomena zaman yang kian variatif. Terkadang memang ada hal-hal tertentu yang tidak bisa masuk dalam akal, namun para filsuf menawarkan pendekatan nilai moral untuk menjawabnya, hal ini kurang lebih sejalan dengan dua tipe perilaku sosial seperti yang disebutkan di atas.

Seperti yang dikutip oleh Harun Nasution dari perkataan Immanuel Kant dalam pembicaraan tentang adanya Tuhan. Menurut Kant, logika tidak bisa memberikan keyakinan pasti tentang keberadaan Tuhan, sehingga ia beralih kepada perasaan. Menurutnya, perasaanlah yang dengan jelas menunjukkan bahwa Tuhan harus ada. Jika akal membebaskan manusia untuk percaya atau tidak, hati nurani memberikan dorongan untuk percaya bahwa Tuhan ada.[10]

Keterkaitan ilmu politik dengan filsafat terletak pada pembahasan mengenai sifat dasar, asal-usul, dan nilai negara. Negara dan manusia dianggap sebagai bagian dari alam semesta. Dalam filsafat, masalah etika menjadi perhatian utama, khususnya terkait norma baik atau buruk, tindakan adil atau tidak adil, serta keputusan etis. Hal ini memunculkan pertanyaan seperti

---

[7]. Yusuf Abdhul Aziz, 'Sosiologi Politik: Pengertian, Menurut Ahli, Konsep Dan Contoh' (Deepublish Store, 2023) <https://deepublishstore.com/blog/materi/sosiologi-politik/?srsltid=AfmBOoqwdlJIdY2ABZzioWhuOQ5MdPNuDidbESbfbk7aXaJ-dKsBBXZe>.

[8]. Vivin Devi Prahesti, 'Analisis Tindakan Max Weber Dalam Kebiasaan Membaca Asmaul Husna Peserta Didik MI/SD', *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, 13 (2021), hal. 143.

[9]. Dra. Parwitaningsih, 'Pengertian Ruang Lingkup Sosiologi Politik' (Universitas Terbuka), hal. 1.5-1.6.

[10]. Harun Nasution, *Filsafat Agama* (Bulan Bintang, 1973), hal. 68.

bagaimana sistem pemerintahan yang ideal seharusnya, atau bagaimana pemimpin seharusnya bertindak demi kebaikan warganya.

Ketika membahas sosiologi politik, penting untuk memahami definisinya terlebih dahulu. Menurut Philo C. Wasburn, sosiologi politik adalah cabang sosiologi yang menganalisis dinamika hubungan kekuasaan (*power*) dan wewenang (*authority*) dalam organisasi, kelompok masyarakat, negara, bahkan di tingkat internasional. Analisis ini menyoroti bagaimana kekuasaan dan wewenang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial budaya, seperti struktur kelompok, agama, ekonomi, kelas sosial, kelompok kepentingan, serta nilai dan kepercayaan bersama.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa ilmu politik fokus pada aspek khusus dalam kehidupan masyarakat, yaitu kekuasaan. Kajian ilmu politik meliputi upaya untuk memperoleh, mempertahankan, dan menggunakan kekuasaan. Di sisi lain, sosiologi mempelajari masyarakat secara umum dan berusaha menemukan pola-pola umum di dalamnya. Sosiologi politik, sebagai gabungan keduanya, turut mempelajari cara memperoleh kekuasaan, yang dalam konteks sosiologi sering digambarkan dalam bentuk persaingan (*competition*) atau konflik (*conflict*).[11]

Keadaan sosio-politik memang tidak selamanya dalam situasi tidak baik-baik saja, pasti mengalami pasang surutnya, dan seharusnya itu merupakan tugas dari negara untuk berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan merealisasikan konsep negara ideal.

Al-Farabi dan Filsafat Politiknya

1. Riwayat Hidup al-Farabi

Abu Nasr Muhammad al-Farabi lahir di Wasij, sebuah desa di Farab (Transoxania), pada tahun 870 M. Ia diketahui berasal dari Turki dan merupakan putra seorang jenderal. Dalam perjalanan hidupnya, al-Farabi pernah menjabat sebagai hakim. Setelah meninggalkan kampung halamannya, ia pindah ke Baghdad, yang saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan. Di sana, ia belajar selama 20 tahun di bawah bimbingan Abu Bisr Matta ibnu Yunus, seorang penerjemah ternama. Kemudian, al-Farabi pindah ke Aleppo dan tinggal di istana Saif al-Daulah, tempat berkumpulnya para ilmuwan dan filsuf pada masa itu. Di istana tersebut, ia mencurahkan perhatian sepenuhnya pada ilmu pengetahuan dan filsafat. Al-Farabi meninggal dunia di Aleppo pada tahun 950 M, pada usia 80 tahun.

Ia memiliki pandangan bahwa filsafat tidak seharusnya disebarluaskan kepada orang awam. Menurutnya, filsuf perlu menyampaikan gagasan-gagasan mereka dalam bahasa yang sulit dipahami, untuk mencegah kebingungan di kalangan masyarakat umum dan melindungi iman serta keyakinan mereka. Al-Farabi juga meyakini bahwa agama dan filsafat tidak bertentangan, tetapi justru saling melengkapi dalam membawa manusia kepada kebenaran.[12]

Intelektualitas Al-Farabi tidak diragukan lagi, ia banyak menguasai disiplin ilmu, diantaranya matefisika, logika, filsafat dan politik. Pengaruh kecerdasanya dipengaruhi oleh ketekunan dan keterampilan, serta kecerdasannya. Pada saat itu, penerjemahan secara besar-besaran buku filsafat dari Yunani. Oleh karena itu, ia membaca berbagai macam buku berhubungan langsung dengan ilmu-ilmu agama dan sains. Berdasarkan tulisan muridnya bahwa ia menguasai 70 Bahasa. Gagasan pemikran Al-Farabi tentang filsafat sosial-politik berangkat dari kekhawatiranya ketika politik berada di tangan orang awam. Sebab menurutnya, suatu negara akan hancur jika dipimpin orang yang tidak memiliki pengetahuan atasnya. Politik adalah titik sentral keberlangsungan hidup masyarakat di sebuah negara yang butuh pemimpin yang memiliki logika dan moral yang baik. Bahkan menurutnya, sosok paling ideal untuk menjadi seorang pemimpin

[11]. Parwitaningsih, 'Pengertian Ruang Lingkup Sosiologi Politik', hal. 1.12.
[12]. Nasution, *Filsafat Dan Mistisisme Dalam Islam*, hal. 16.

adalah filosof yang memiliki keimanan dan kebijaksanaan. Jadi seorang pemimpin harus mengusai filsafat sebagai metode berfikir sitematis dan membawa jalan kebenaran.[13]

2. Filsafat Kenabian dan Teori Politik al-Farabi

Al-Farabi adalah seorang filsuf Muslim yang mengembangkan dasar-dasar filsafat Islam secara sistematis dan rinci agar lebih mudah dipahami oleh generasi setelahnya. Pemikiran filsafatnya banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Ia berpendapat bahwa alam semesta tercipta melalui proses emanasi, yakni limpahan wujud dari Sang Pencipta (Allah) yang terjadi secara bertingkat. Menurut al-Farabi, para filsuf mendapatkan kebenaran melalui kekuatan akal, sementara para Nabi menerima kebenaran melalui wahyu yang diberikan kepada mereka sebagai manusia pilihan Tuhan.

Dalam filsafat emanasi, al-Farabi membagi tingkatan akal menjadi sepuluh, dengan Akal Kesepuluh sebagai tingkatan tertinggi. Dalam pandangan Islam, Akal Kesepuluh ini dapat diidentikkan dengan malaikat. Para filsuf mampu memahami hakikat-hakikat melalui komunikasi dengan Akal Kesepuluh, begitu pula Nabi atau Rasul yang dapat menerima wahyu melalui hubungan dengan tingkatan ini. Namun, kedudukan Nabi atau Rasul lebih tinggi daripada filsuf. Nabi atau Rasul menerima wahyu bukan atas usaha sendiri, melainkan sebagai anugerah dari Tuhan.

Para filsuf dapat mencapai komunikasi dengan Akal Kesepuluh melalui latihan dan kontemplasi yang mendalam, menggunakan akal yang telah berkembang sempurna, yang disebut *akal mustafad* (akal perolehan). Sebaliknya, Nabi atau Rasul tidak memerlukan tingkat akal mustafad, karena mereka memiliki daya imajinasi yang luar biasa kuat yang dianugerahkan oleh Tuhan. Daya imajinasi ini memungkinkan mereka untuk mengadakan hubungan langsung dengan Akal Kesepuluh tanpa melalui latihan tertentu.

Dengan daya imajinasi yang kuat ini, Nabi atau Rasul mampu melepaskan diri dari pengaruh pancaindera dan tuntutan jasmani, sehingga dapat sepenuhnya fokus dalam berhubungan dengan Akal Kesepuluh. Karena pengetahuan filsafat yang diperoleh filsuf dan wahyu yang diterima Nabi berasal dari sumber yang sama, yakni Akal Kesepuluh, maka keduanya tidak saling bertentangan.

Mukjizat juga dijelaskan oleh al-Farabi sebagai hasil dari hubungan dengan Akal Kesepuluh, yang memungkinkan terjadinya hal-hal luar biasa yang bertentangan dengan kebiasaan. Filsafat ini dirumuskan oleh al-Farabi untuk menjawab dan menentang pandangan aliran-aliran yang meragukan keberadaan Nabi atau Rasul dan menolak konsep wahyu, seperti yang diajarkan oleh al-Razi dan tokoh-tokoh lain pada zamannya.[14]

Filsafat kenabian al-Farabi memiliki kaitan erat dengan teori politiknya, sebagaimana diuraikan dalam karyanya *Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah* (*Pandangan Penduduk Kota Utama*). Al-Farabi membandingkan masyarakat dengan tubuh manusia, di mana setiap bagian saling berhubungan dan memiliki fungsi tertentu untuk kepentingan keseluruhan. Dalam masyarakat, setiap individu harus diberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Posisi terpenting dalam masyarakat adalah pemimpin, yang dalam tubuh manusia diibaratkan seperti akal. Pemimpin adalah sumber aturan dan keharmonisan dalam masyarakat. Ia harus sehat jasmani, cerdas, mencintai ilmu pengetahuan, berkomitmen pada keadilan, dan memiliki akal tingkat ketiga, yaitu *akal mustafad* (akal yang telah mencapai kesempurnaan) sehingga dapat berkomunikasi dengan Akal Kesepuluh, pengatur bumi.

Pemimpin terbaik adalah Nabi atau Rasul. Pemimpin seperti ini mampu membuat aturan-aturan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat, menciptakan kemakmuran, serta mendidik anggota masyarakat untuk memiliki akhlak yang baik. Jika sifat-sifat kenabian atau kerasulan

[13]. Muzairi, *Filsafat Umum* (Kalimadia, 2015), hal. 111.

[14] Nasution, *Falsafat Dan Mistisisme Dalam Islam*, hal 20.

tidak ditemukan dalam satu orang, kepemimpinan dapat dibagi di antara beberapa individu yang memiliki sifat-sifat seperti filsuf, keadilan, dan kebijaksanaan.

Menurut al-Farabi, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Kebahagiaan manusia hanya dapat tercapai melalui kehidupan bermasyarakat, di mana setiap individu bekerja sama demi kebaikan bersama. Oleh karena itu, Al-Farabi membagi jenis masyarakat ke dalam tiga kategori:

1. *Al-Madinah al-Fadilah* (Kota Utama): Masyarakat yang anggotanya bekerja sama untuk mencapai kebaikan bersama, hidup dengan akhlak mulia, dan mengutamakan tujuan spiritual. Jiwa yang hidup di *al-Madinah al-Fadilah* disebut *jiwa fadilah*, yang dapat melepaskan diri dari ikatan materi dan akan kekal.
2. *Al-Madinah al-Jahilah* (Kota Jahil): Masyarakat yang anggotanya hanya mengejar kesenangan jasmani. Jiwa mereka terikat pada materi dan akan hancur bersama tubuh mereka.
3. *Al-Madinah al-Fasiqah* (Kota Fasik): Masyarakat yang anggotanya memiliki pengetahuan seperti di *al-Madinah al-Fadilah*, tetapi tingkah laku mereka sama dengan *al-Madinah al-Jahilah*. Jiwa mereka tidak hancur tetapi akan kekal dalam penderitaan, karena mereka tahu kebenaran tetapi menolaknya.[15]

Menurut al-Farabi, jiwa yang akan kekal disebut sebagai *jiwa fadilah*, yaitu jiwa-jiwa yang melakukan kebaikan dan berhasil melepaskan diri dari ikatan jasmani. Jiwa ini, yang mungkin berasal dari masyarakat *al-Madinah al-Fadilah* (Kota Utama), mencapai kesempurnaan dan akan kekal meskipun tubuhnya hancur. Sebaliknya, *jiwa Jahilah*, yakni jiwa yang tidak mencapai kesempurnaan dan masih terikat pada materi, akan binasa bersama tubuhnya. Jiwa ini kemungkinan berasal dari masyarakat *al-Madinah al-Jahilah* (Kota Jahil), di mana kehidupan hanya berorientasi pada kesenangan jasmani.

Sementara itu, jiwa yang mengetahui kebenaran namun memilih untuk menolaknya yang mungkin berasal dari masyarakat *al-Madinah al-Fasiqah* (Kota Fasik) tidak akan hancur, tetapi akan kekal dalam keadaan sengsara. Jiwa ini menyadari nilai kebenaran tetapi tetap tidak menjalankannya, sehingga penderitaannya bersifat abadi. Bagi al-Farabi, konsep surga dan neraka bukanlah tempat fisik, melainkan kondisi spiritual jiwa. Surga adalah keadaan jiwa yang mencapai kebahagiaan abadi karena hidup sesuai dengan kebaikan, sedangkan neraka adalah keadaan jiwa yang menderita karena menolak kebenaran.[16]

3. Masyarakat Ideal al-Farabi

Setiap individu manusia terlahir dengan kebutuhan, baik untuk kelangsungan hidupnya maupun untuk mencapai kesempurnaan dirinya, di samping itu banyak hal yang tidak dapat ia lakukan sendiri. Ia membutuhkan kelompok orang di mana masing-masing anggota melakukan sesuatu yang dibutuhkan oleh individu tersebut. Dan setiap individu berada dalam kondisi yang sama. Oleh karena itu, manusia tidak mungkin mencapai kesempurnaan yang telah ditetapkan oleh fitrah alamiah kecuali dengan bergabung dalam sebuah kelompok besar yang saling bekerja sama, di mana setiap individu melakukan sesuatu untuk individu lainnya demi kelangsungan hidupnya.

Dengan demikian, individu tersebut akan memperoleh semua yang dibutuhkannya untuk kelangsungan hidup dan pencapaian kesempurnaan dari keseluruhan kelompok. Karena alasan inilah manusia tersebar di seluruh muka bumi dan membentuk berbagai macam kelompok sosial.

Kelompok sosial ini ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Kelompok sosial yang sempurna terbagi menjadi tiga jenis: terbesar, menengah, dan terkecil. Kelompok terbesar adalah seluruh umat manusia di muka bumi. Kelompok menengah adalah sebuah bangsa dalam suatu wilayah di muka bumi. Dan kelompok terkecil adalah penduduk sebuah kota dalam wilayah

[15]. Nasution, *Falsafat Dan Mistisisme Dalam Islam*, hal. 21.
[16]. Nasution, *Falsafat Dan Mistisisme Dalam Islam*, hal. 22.

suatu bangsa.

Adapun kelompok sosial yang belum sempurna adalah penduduk desa, penduduk lingkungan, kemudian kelompok yang lebih kecil lagi seperti kelompok dalam suatu gang atau keluarga. Keluarga merupakan kelompok terkecil, sedangkan desa dan kota adalah untuk kepentingan agama, namun desa melayani kota sebagai pelayan dan lingkungan adalah bagian dari kota. Demikian pula, gang adalah bagian dari lingkungan, rumah adalah bagian dari gang, kota adalah bagian dari wilayah suatu bangsa, dan bangsa adalah bagian dari seluruh umat manusia di muka bumi.[17]

Al-Farabi dalam bukunya menegaskan akan pentingnya kehidupan bermasyarakat bagi manusia. Manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan hidupnya. Paragraf ini juga mengklasifikasikan berbagai bentuk kelompok sosial, dari yang paling besar hingga yang paling kecil, serta menjelaskan hubungan antar kelompok tersebut.

Kebaikan yang paling utama dan kesempurnaan yang paling tinggi hanya dapat dicapai pertama-tama melalui kota, bukan melalui bentuk perkumpulan yang lebih kecil darinya. Dan karena hakikat kebaikan adalah sesuatu yang diperoleh melalui pilihan dan kemauan, begitu pula keburukan hanya terjadi karena pilihan dan kemauan, maka sebuah kota dapat dijadikan alat untuk bekerja sama mencapai tujuan-tujuan tertentu yang pada hakikatnya adalah keburukan. Oleh karena itu, tidak semua kota dapat mencapai kebahagiaan.

Kota yang tujuan perkumpulannya adalah untuk bekerja sama dalam mencapai hal-hal yang benar-benar mendatangkan kebahagiaan adalah kota yang ideal. Perkumpulan yang bertujuan untuk bekerja sama mencapai kebahagiaan adalah perkumpulan yang ideal. Dan bangsa yang semua kotanya bekerja sama untuk mencapai kebahagiaan adalah bangsa yang ideal. Begitu pula, dunia yang ideal hanya dapat terwujud jika semua bangsa di dalamnya bekerja sama untuk mencapai kebahagiaan.

Dan kota yang ideal itu ibarat tubuh yang sempurna dan sehat di mana semua anggotanya bekerja sama untuk menyempurnakan kehidupan makhluk hidup dan menjaganya. Sama seperti tubuh yang anggotanya berbeda-beda dalam fitrah dan kekuatannya, dan di dalamnya ada satu organ utama yaitu hati, dan organ-organ lainnya memiliki tingkatan yang semakin mendekati organ utama tersebut. Setiap organ secara alami memiliki kekuatan untuk melakukan fungsinya demi mencapai tujuan utama dari organ utama tersebut. Ada organ-organ lain yang memiliki kekuatan untuk melakukan fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan dari organ-organ yang tidak langsung terhubung dengan organ utama - ini adalah tingkatan kedua. Dan ada organ-organ lain yang melakukan fungsi sesuai dengan tujuan dari organ-organ yang berada pada tingkatan kedua ini, dan seterusnya hingga sampai pada organ-organ yang hanya melayani dan tidak memimpin.

Begitu pula dengan kota, bagian-bagiannya berbeda dalam fitrah dan kedudukannya. Di dalamnya ada manusia yang menjadi pemimpin, dan ada orang lain yang kedudukannya mendekati pemimpin. Setiap individu memiliki kemampuan dan sifat yang membuatnya melakukan tindakan yang sesuai dengan tujuan pemimpin. Mereka adalah orang-orang yang berada pada tingkatan pertama. Di bawah mereka ada orang-orang yang melakukan tindakan sesuai dengan tujuan dari orang-orang pada tingkatan pertama, dan mereka berada pada tingkatan kedua. Di bawah mereka juga ada orang-orang yang melakukan tindakan sesuai dengan tujuan dari orang-orang pada tingkatan kedua, dan seterusnya. Bagian-bagian kota terus berurutan hingga sampai pada orang-orang yang melakukan tindakan sesuai dengan tujuan mereka sendiri, sehingga mereka hanya melayani dan tidak dilayani, dan mereka berada pada tingkatan terendah.

Akan tetapi, anggota tubuh itu alami, dan bentuk-bentuk yang memiliki kekuatan alami. Sedangkan bagian-bagian kota, meskipun mereka alami, namun bentuk-bentuk dan kemampuan

[17]. Abu Nashr Al-farabi, *Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah* (Centre Tunisien du Livre, 2024), hal. 95–96.

yang mereka gunakan untuk melakukan tindakan bagi kota bukanlah alami, melainkan hasil kehendak. Meskipun bagian-bagian kota secara fitrah memiliki perbedaan fitrah yang cocok antara satu manusia dengan manusia lainnya untuk hal yang satu dan yang lain, namun mereka tidak menjadi bagian dari kota secara fitrah yang mereka miliki sendiri, melainkan melalui kemampuan-kemampuan yang dihasilkan oleh kehendak, seperti keterampilan dan hal-hal yang serupa. Dan kekuatan-kekuatan yang secara alami ada pada anggota tubuh, maka padanannya pada bagian-bagian kota adalah kemampuan dan bentuk-bentuk yang dihasilkan oleh kehendak.[18]

Dalam bukunya, al-Farabi kembali menegaskan konsep kota ideal dan bagaimana kota dapat menjadi sarana untuk mencapai kebaikan dan kebahagiaan, ia juga membandingkan kota ideal dengan tubuh manusia. Sama seperti tubuh memiliki berbagai organ dengan fungsi yang berbeda, kota ideal juga terdiri dari berbagai kelompok masyarakat dengan peran yang berbeda. Organ utama dalam tubuh (hati) diibaratkan sebagai pemimpin dalam kota, sedangkan organ-organ lain mewakili berbagai lapisan masyarakat dengan tanggung jawab yang berbeda-beda. Teks ini menyoroti perbedaan mendasar antara organisme biologis (tubuh manusia) dan organisme sosial (kota). Meskipun keduanya memiliki struktur dan fungsi, mekanisme yang membentuk keduanya sangat berbeda.

Sosio-Politik Timur-Tengah dan Afrika Utara Pada Arab Spring

1. Sejarah dan Latar Belakang

Menurut laporan dari Liputan6.com, Arab Spring adalah serangkaian gerakan anti-pemerintah yang melibatkan aksi protes, pemberontakan, dan pemberontakan bersenjata. Gerakan ini meluas di wilayah Jazirah Arab hingga Afrika Utara pada akhir 2010-an. Arab Spring bermula dari aksi protes di Tunisia dan Mesir yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sedang berkuasa.

Protes tersebut kemudian menginspirasi negara-negara lain di sekitarnya untuk melakukan hal serupa. Dorongan untuk menggulingkan pemerintahan pada masa itu dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan terhadap pemerintah yang dinilai abai terhadap aspirasi masyarakat. Pemerintah juga dianggap sering melakukan tindakan represif dalam menanggapi unjuk rasa yang menyoroti masalah politik, sosial, dan ekonomi.[19]

Arab Spring bermula dari kawasan barat Afrika Utara dan meluas ke Timur, apa yang memulainya? Dan mengapa hal ini bisa menyebar ke negara lainnya begitu cepat?

Pada abad ke-16 Kekaisaran Ottoman menguasai wilayah Afrika Utara, mereka membantu pembangunan lokal di kota-kota besar, hingga pada pertengahan abad ke-19 Eropa mulai menguasai wilayah-wilayah tersebut. Seperti Perancis yang berhasil menduduki beberapa wilayah Afrika Utara seperti Tunisia, Libya, Aljazair dan Maroko. Hebatnya Perancis adalah, mereka membuat daerah dudukannya bergantung kepada mereka dari sektor ekonomi yang mana itu adalah hal fundamental dalam keberkelangsungan kehidupan. Setelah ekonomi, mereka juga mengontrol sistim pemerintahannya serta memberikan armada militer untuk melindungi daerah jajahannya.

Dampaknya adalah migrasi warga Eropa ke Afrika, seperti Aljazair dan Tunisia, sedangkan pekerja upah rendah Afrika dibawa ke Eropa. Perancis juga mengenalkan kepada jajahannya dengan sejarah Eropa seperti revolusi, pemikiran yang liberal dan paham ideologi kiri tersebar di seluruh lapisan masyarakat jajahan. Dampaknya dapat terlihat dari banyaknya

[18]. Al-farabi, *Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah*, hal. 97.

[19]. Mabruri Pudyas Salim, 'Pengertian Arab Spring, Sejarah, Latar Belakang, Dan Dampaknya', *Liputan6* (liputan6.com, 2023) <https://www.liputan6.com/hot/read/5285613/pengertian-arab-spring-sejarah-latar-belakang-dan-dampaknya?page=3>.

kelahiran tokoh pemikir dari Tunisia khususnya yang memiliki pemikiran liberal, seperti Syekh Khudar Hussain, Thahir Haddad, Abd al-Aziz al-Tsa'labiy, hingga yang terkini seperti Abd al-Majid Sharafi, Olfa Youssef dan Aisyah al-Hadhriy. Mereka semua dari kalangan reformis Islam di Tunisia, yang berupaya untuk memberikan kebabasan dalam berfikir sehingga tidak terkurung dalam beragama.

Rasa ketidakpuasan rakyat menjadi amunisi tambahan dalam upaya mencapai kemerdekaan yang menjadi semakin menyala. Tokoh Tunisia seperti Abd al-Aziz al-Tsa'labiy mengkritik para tokoh agama yang pada masa penjajahan, alih-alih membantu melawan untuk mengusir penjajah melainkan berdiam diri di tempat ibadah dengan dalih kesufiannya. Hal ini menuai pro-kontra, tetapi memang sudah sepatutnya hal yang bisa dilakukan dalam membantu negara meraih kemerdekaanya adalah terjun ke jalan-jalan hingga para penjajah mulai meninggalkan tanah yang mereka duduki. Satu persatu negara Timur-Tengah dan Afrika Utara mulai mendapatkan kemerdekannya, Tunisia merdeka pada 20 Maret 1956, penjajah pun meninggalkan Tunisia.

Kemerdekaan yang dimimpikan masyarakat tenyata tidak seindah yang dibayangkan, alih-alih menyelesaikan masalah melainkan menambah masalah baru. Era baru, namun masalah yang lama tetap ada. Pemerintahan yang baru justru mengunakan sistim politik yang dilakukan oleh penjajahnya dahulu, masyarakat biasa hanya dijadikan alat bagi para kaum elit untuk memperebutkan kekuasaan. Alhasil otoritarianisme, korupsi, dan kebijakan ekonomi yang tidak adil mulai meluas ke seluruh Timur-Tengah dan Afrika Utara, tetapi stigma masyarakat yang beranggapan karena pemerintah masih dianggap sebagai yang bertanggung jawab untuk mengusir penjajahan menjadi alasan untuk tetap diam.

Sayangnya, lambat laun generasi yang tidak mengalami penjajahan mulai bermunculan, alhasil propaganda bahwa pemerintahan tidak bisa salah karena mereka bertanggung jawab dalam mengusir penjajahan, tidak dapat diterima begitu saja. Meluasnya korupsi makin memperparah situasi ekonomi dan sosial masyarakat, ditambah dengan mulai masuknya di era globalisasi tidak memungkinkan rezim otoriter merahasiakan kejahatannya.

Ketika seorang pria muda bernama Mohammed Bouazizi meninggal setelah membakar dirinya di kota Sidi Bouzid, 265 kilometer dari Tunis, pada pertengahan Desember 2010, mahasiswa, kaum muda dan yang lainnya turun ke jalan untuk memprotes pengangguran dan biaya hidup yang tinggi. Gejolak tersebut tersebut berlanjut pada kerusuhan dan bentrokan dengan polisi dan tentara yang menyebar ke daerah-daerah lain Tunisia, termasuk Jendouba, Kasserine, Le Kef dan Gafsa, dan kemudian ke kota-kota besar dan ibukota.

Presiden Zine El Abidine Ben Ali dan keluarganya melarikan diri ke pengasingan di Arab Saudi pada 14 Januari 2011, mengakhiri 23 tahun pemerintahannya. Gelombang revolusi dirasakan juga di negara-negara tetangga seperti Mesir dan Libya. Peristiwa ini telah mengguncang stabilitas, ekonomi, sosial dan politik di Tunisia dan diprediksi akan terjadi perubahan tajam untuk meraih masa depan. Untuk membenahi negara pasca revolusi, pada tanggal 23 Oktober 2011 Pemerintah Transisi menyelenggarakan Pemilu Dewan Konstituante yang sebelumnya direncanakan digelar pada tanggal 24 Juli.

Selanjutnya Pemerintah juga dituntut untuk mengakhiri korupsi dan sistem pemerintahan yang buruk, memulihkan perekonomian dan memenuhi berbagai tuntutan sosial. Normalisasi kehidupan dan stabilisasi perekonomian tahun 2012 tergantung pada cara menyikapi berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi Tunisia. Untuk menghindari gejala yang tidak baik, sementara itu Pemerintah dituntut agar tetap menjaga subsidi untuk produk kebutuhan utama dan energi dan menciptakan peluang kerja bagi warga baik di sektor publik maupun di proyek-proyek investasi secara umum.

2. Efek Domino Pembakaran Diri Mohamed Bouazizi

Gerakan "Arab Spring" disebut demikian karena istilah "Spring" telah lama digunakan untuk menggambarkan upaya menuju demokrasi, terinspirasi oleh Revolusi 1848 di Eropa yang dikenal sebagai *People's Spring* atau *Musim Semi Rakyat*. Sebelumnya, istilah serupa juga digunakan dalam "Prague Spring" di Cekoslowakia tahun 1968. Pada 2011, media Barat mempopulerkan istilah "Arab Spring" untuk merujuk pada gelombang protes yang terjadi di berbagai negara Arab.

Gerakan ini berawal dari *Revolusi Melati* di Tunisia yang berhasil menggulingkan pemerintahan, menginspirasi aksi serupa di Mesir. Anak muda Mesir memanfaatkan media sosial untuk mengorganisasi aksi protes yang kemudian memuncak pada demonstrasi besar-besaran pada 25 Januari 2011.

Protes yang meluas ke seluruh negeri membuat aparat keamanan kewalahan. Setelah beberapa hari demonstrasi dan bentrokan di berbagai kota, militer Mesir menyatakan tidak akan menggunakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Akhirnya, pada 11 Februari 2011, setelah kehilangan dukungan militer, Presiden Husni Mubarak mundur dari jabatannya setelah hampir 30 tahun berkuasa, menyerahkan kekuasaan kepada dewan perwira militer senior.

Kesuksesan protes di Tunisia dan Mesir memicu gerakan serupa di Yaman, Bahrain, Libya, dan Suriah pada awal 2011. Namun, tidak semua aksi ini berhasil seperti di Tunisia dan Mesir. Di banyak negara, protes berubah menjadi konflik berdarah antara kelompok oposisi dan rezim yang berkuasa, mengakibatkan kerugian besar dan instabilitas politik.[20]

3. Dampak Sosio-Politik dan Ekonomi

Perspektif ruang publik memberikan pandangan alternatif yang penting untuk menjelaskan mengapa Arab Spring menjadi isu regional, bukan sekadar fenomena lokal di Tunisia atau Mesir. Berbeda dengan teori gelombang demokratisasi yang mengasumsikan bahwa revolusi Arab Spring secara otomatis akan membawa proses demokratisasi dan transisi, perspektif ini menekankan bahwa keberhasilan demokratisasi sangat bergantung pada dinamika ruang publik.

Dalam pandangan ini, Arab Spring tidak hanya soal menggulingkan rezim, tetapi juga perebutan ruang publik sebagai arena interaksi politik. Demokratisasi baru memiliki arti jika ruang publik menjadi tempat bagi dialog dan perdebatan yang melibatkan semua kekuatan politik secara setara. Ruang publik yang inklusif memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka, membangun konsensus, dan menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Tanpa perebutan dan pengelolaan ruang publik yang sehat, demokratisasi berisiko terhenti atau bahkan berbalik menjadi konflik atau otoritarianisme baru.[21]

Pertumbuhan perekonomian Tunisia selama 8 bulan pertama tahun 2011 ditandai dengan stagnasi berbagai aktivitas di semua sektor akibat unjuk rasa, pemogokan dan instabilitas kondisi keamanan secara umum yang menyebabkan penurunan produksi di sejumlah sektor khususnya sektor minyak sebesar -14,4%, fosfat dan turunannya -54% serta semen -6,4%. Untuk sektor pariwisata, selama bulan Juli tercatat mengalami pertumbuhan yang signifikan dari jumlah spent night di hotel-hotel sehingga dapat mengurangi penurunan spent night menjadi 47% pada 7 bulan pertama dari 53% pada 6 bulan pertama.

Sementara itu, sejumlah sektor tercatat mengalami pertumbuhan yang positif, di antaranya industri listrik dengan peningkatan produksi mencapai 1,9%, di samping peningkatan sektor mekanik dan elektrik akibat pertumbuhan ekspornya, begitu juga dengan sektor tekstil, kulit, industri pangan. Peningkatan yang sama terjadi juga pada sektor jasa meliputi komunikasi,

[20]. Salim, 'Pengertian Arab Spring, Sejarah, Latar Belakang, Dan Dampaknya'.

[21]. Gebyar Lintang Ndadari Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, Arief Bakhtiar Darmawan, Faela Sufa, 'Media Sosial Dan Revolusi Politik: Memahami Kembali Fenomena Arab Spring Dalam Perspektif Ruang Publik Transnasional', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 18 (2014), hal. 134.

perdagangan dan transportasi.

Dari segi perdagangan, ekspor selama 7 bulan pertama tercatat meningkat 10,2% lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2010 yang mencapai 20,1%. Ekspor industri pangan selama periode tersebut tercatat meningkat 35,3% padahal pada periode yang sama tahun sebelumnya menurun sebesar 8,3%. Adapun ekspor manufactured goods meningkat sebesar 13,3% berkat kontribusi institusi-institusi perekonomian yang menganut sistem total export yang mengalami pertumbuhan sekitar 19%.

Dari segi impor, selama 7 bulan pertama tahun 2011 tercatat mengalami kenaikan sebesar 3,2% sedangkan pada periode yang sama tahun 2010 mencapai 31,3%. Peningkatan impor dimaksud ada pada semi-manufactured goods 6,4%, energi 16,9%, bahan pangan 33,9%. Adapun impor perlengkapan rumah tangga tercatat menurun 10,8%. Sejumlah perkembangan tersebut telah meningkatkan coverage ratio sebesar 5,1% menjadi 78,5% pada 7 bulan pertama tahun 2011 dari 73,4% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Terkait masalah investasi, nilai foreign direct investment (FDI) selama 7 bulan pertama tahun 2011 tercatat menurun lebih dari 20% dari US$ 735 juta periode yang sama tahun 2010 menjadi US$ 608 juta tahun 2011. Terkait Investasi industri manufaktur selama 8 bulan pertama tahun 2011 tercatat mencapai sekitar US$ 1,200 juta, sedangkan selama periode yang sama pada tahun sebelumnya hanya mencapai sekitar US$ 620 juta. Peningkatan tersebut telah berkontribusi pada pertumbuhan global authorized manufacturing investment intentions di Tunisia yang mencapai 23,6% dari US$ 1,260 juta pada 8 bulan pertama tahun 2010 menjadi US$ 1,560 juta pada periode yang sama tahun 2011.[22]

Produksi fosfat di Tunisia telah berperan penting dalam ekonomi negara tersebut dan memberikan kontribusi signifikan terhadap nilai ekspor dan peningkatan PDB (Produk Domestik Bruto) Tunisia. Sejak tahun 1896, produksi fosfat di Tunisia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan selama berbagai periode sejarah. Era modern, khususnya dimulai dari tahun 1890-an hingga saat ini, telah menyaksikan penemuan banyak cadangan baru fosfat di Tunisia dan peningkatan eksploitasi fosfat yang terorganisir.

Di tahun 2010, Tunisia mencapai puncak kejayaannya dengan berhasil meraih peringkat ketiga di dunia sebagai negara penghasil fosfat terbanyak, yaitu sekitar 8 juta ton. Sebanyak 80% dari total produksi fosfat Tunisia dialokasikan untuk diekspor ke negara lain, sedangkan 20% sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik dalam negeri. Hal ini tentunya jelas menggambarkan fosfat sebagai salah satu sektor vital yang merupakan pilar ekonomi Tunisia.

Sebaliknya di tahun 2011, revolusi ekonomi yang terjadi di Tunisia menyebabkan gangguan operasional, ketidakpastian ekonomi, dan perubahan dalam kebijakan industri sehingga mempengaruhi aktivitas penambangan serta pengolahan fosfat. Alhasil produksi turun dari 8,1 juta ton pada tahun 2010 menjadi 2,3 juta ton.

Puncaknya di tahun 2011, para penduduk melakukan unjuk rasa terhadap tingkat pengangguran yang tinggi, kurangnya pembangunan regional, dan dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan fosfat. Namun, demonstrasi tersebut membuat pemerintah menyalahkan pengunjuk rasa atas penurunan aktivitas pengohalan fosfat, dengan mengesampingkan upaya mencari solusi bagi ketegangan masyarakat Gafsa. Hingga akhirnya, di tahun tersebut, pabrik dan kantor administrasi fosfat di daerah Gafsa terpaksa mengalami vakum produksi karena mogok kerja yang dilakukan oleh para karyawannya. Hal tersebut berdapak panjang bagi penurunan produksi fosfat hingga saat ini, sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah Tunisia untuk meraih kembali masa kejayaannya dalam menghasilkan tambang fosfat.

Setelah 11 tahun pemerintah Tunisia mengusahakan peningkatan produksi fosfat, akhirnya pada bulan mei 2022, Tunisia kembali menjalin kerjasama global dengan mengekspor fosfat ke beberapa negara seperti Brasil, Turki, Pakistan, Indonesia, dan Prancis. Karena

[22]. http://apps.ins.tn/comex/fr/index.php

keberhasilan tersebut, di tahun yang sama pemerintah mengadakan evaluasi besar-besaran bagi sektor fosfat. Dua poin penting yang dibahas dalam evaluasi tersebut adalah hambatan dan target produksi fosfat Tunisia di masa mendatang.[23]

Kesimpulan

Arab Spring, serangkaian pemberontakan populer yang melanda Timur Tengah dan Afrika Utara, menjadi pengingat kuat tentang pencarian abadi manusia akan keadilan, martabat, dan pemerintahan yang berarti. Dengan memeriksa periode penuh gejolak ini melalui lensa filsafat politik Al-Farabi, kita memperoleh wawasan berharga tentang penyebab mendasar revolusi-revolusi ini dan jalur potensial menuju masa depan yang lebih adil dan setara. Konsep negara-kota ideal Al-Farabi, yang ditandai oleh kepemimpinan moral, keadilan sosial, dan partisipasi aktif warganya, menawarkan kerangka kerja yang menarik untuk memahami aspirasi para pengunjuk rasa Arab Spring.

Revolusi tahun 2010 mengungkapkan ketidakpuasan mendalam terhadap rezim otoriter, ketidaksetaraan ekonomi, dan ketidakadilan sosial. Penekanan Al-Farabi pada pentingnya penguasa yang adil dan bijaksana sangat relevan dengan konteks ini. Ketiadaan kepemimpinan semacam itu di banyak negara Arab berkontribusi pada meluasnya kekecewaan dan akhirnya, pemberontakan. Selain itu, gagasan Al-Farabi tentang negara-kota ideal sebagai komunitas yang dipersatukan oleh nilai-nilai bersama dan tujuan bersama beresonansi dengan aspirasi mereka yang berusaha membangun masyarakat yang lebih inklusif dan demokratis.

Namun, Arab Spring juga menyoroti tantangan transisi dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan demokratis. Permainan kompleks identitas suku, sektarian, dan regional, ditambah dengan warisan kolonialisme dan intervensi asing, telah mempersulit pembentukan sistem politik yang stabil dan inklusif. Ide-ide Al-Farabi dapat membantu menginformasikan upaya-upaya ini dengan menekankan pentingnya memupuk rasa kewarganegaraan bersama dan membangun institusi yang mampu mewakili beragam kepentingan masyarakat.

Namun, Arab Spring juga menyoroti tantangan transisi dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan demokratis. Permainan kompleks identitas suku, sektarian, dan regional, ditambah dengan warisan kolonialisme dan intervensi asing, telah mempersulit pembentukan sistem politik yang stabil dan inklusif. Ide-ide Al-Farabi dapat membantu menginformasikan upaya-upaya ini dengan menekankan pentingnya memupuk rasa kewarganegaraan bersama dan membangun institusi yang mampu mewakili beragam kepentingan masyarakat.

[23]. https://www.mosaiquefm.net/

Daftar Pustaka

Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, Arief Bakhtiar Darmawan, Faela Sufa, Gebyar Lintang Ndadari, 'Media Sosial Dan Revolusi Politik: Memahami Kembali Fenomena Arab Spring Dalam Perspektif Ruang Publik Transnasional', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 18 (2014)

Al-farabi, Abu Nashr, *Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah* (Maktabah Matba'ah Muhammad Ali, 1959)

———, *Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah* (Centre Tunisien du Livre, 2024)

Apps.ins.tn/comex/fr/index.php

Aziz, Yusuf Abdhul, 'Sosiologi Politik: Pengertian, Menurut Ahli, Konsep Dan Contoh' (Deepublish Store, 2023) <https://deepublishstore.com/blog/materi/sosiologi-politik/?srsltid=AfmBOoqwdlJIdY2ABZzioWhuOQ5MdPNuDidbESbfbk7aXaJ-dKsBBXZe>

Jamalul Muttaqin & Syamsiyani, 'Al-Farabi: Politik Sebagai Jalan Kebahagiaan', *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, 14 (2022)

Muzairi, *Filsafat Umum* (Kalimadia, 2015)

Nasution, Harun, *Akal Dan Wahyu Dalam Islam*, 1st edn (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986)

———, *Falsafat Agama* (Bulan Bintang, 1973)

———, *Falsafat Dan Mistisisme Dalam Islam* (Bulan Bintang, 2014)

Parwitaningsih, Dra., 'Pengertian Ruang Lingkup Sosiologi Politik' (Universitas Terbuka)

Prahesti, Vivin Devi, 'Analisis Tindakan Max Weber Dalam Kebiasaan Membaca Asmaul Husna Peserta Didik MI/SD', *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, 13 (2021)

Ritaudin, M. Sidi, 'Rekonstruksi Politik Egalitarianisme Bangsa Perspektif Model Negara Madinah', *IAIN Raden Intan Lampung*, 6 (2016)

Salim, Mabruri Pudyas, 'Pengertian Arab Spring, Sejarah, Latar Belakang, Dan Dampaknya', *Liputan6* (liputan6.com, 2023) <https://www.liputan6.com/hot/read/5285613/pengertian-arab-spring-sejarah-latar-belakang-dan-dampaknya?page=3>

www.mosaiquefm.net